

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR



**INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada triwulan II sebagai pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja selama triwulan II. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar disebutkan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pembinaan dan pengawasan, Inspektorat Kota Pematangsiantar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inpektorat Daerah; dan
- h. Dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kota Pematangsiantar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Target Perjanjian Kinerja :

| No. | SASARAN STRATEGIS | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1 | Meningkatnya Kapabilitas APIP | Level/Nilai Kapabilitas APIP | 3 |
| 2 | Meningkatnya Maturitas SPIP | Level/Nilai Maturitas SPIP | 3 |
| 3 | Meningkatnya Maturitas Manajemen Risiko | Level/Nilai Maturitas Manajemen Risiko | 3 |
| 4 | Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan | 78 % |
| | | Opini BPK atas LKPD | WTP |
| 5 | Meningkatnya Akuntabilitas pada Komponen Pengawasan | Nilai AKIP Perangkat Daerah | B |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 |
| | | Inovasi | 1 |

2. Target Anggaran pada Inspektorat :

| No | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|----|--|-----------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 10.218.634.992 |
| | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.795.788.524 |
| | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.795.788.524 |
| | 2. Administrasi Kepegawaian Daerah | 1.349.285.600 |
| | - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; | 1.147.727.000 |
| | - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 201.558.600 |
| | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 557.877.101 |
| | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor; | 6.478.450 |
| | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; | 9.936.611 |
| | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 45.920.000 |
| | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; | 35.783.040 |
| | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. | 447.159.000 |
| | - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12.600.000 |
| | 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 899.655.726 |
| | - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 899.655.726 |

| No | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|----|---|--|
| 2 | 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat; - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. | 432.941.791 129.586.791 77.515.000 225.840.000 |
| | 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 183.086.250 142.530.000 40.556.250 |
| 3 | Program Penyelenggaraan Pengawasan 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah; - Reviu Laporan Kinerja; - Reviu Laporan Keuangan. - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 1.731.900.000 1.217.500.000 409.180.000 302.950.000 41.660.000 72.956.000 390.754.000 |
| | 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 514.400.000 21.940.000 492.460.000 |
| | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan | 708.746.664 54.194.000 25.086.000 29.108.000 |
| | 2. Pendampingan dan Asistensi - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah; - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi; - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 654.552.664 142.650.000 173.130.000 278.802.664 61.380.000 |
| | Jumlah | 12.659.281.656 |

B. PROGRES RENCANA PENCAPAIAN TARGET KINERJA

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Prosentase Proges Rencana Pencapaian Target Kinerja | | | |
|-----|--|---|---|-------|--------|-------------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| 1 | Meningkatnya Kapabilitas APIP | Level/Nilai Kapabilitas APIP | 25 % | 50% | 75% | 100 % / 3 |
| 2 | Meningkatnya Maturitas SPIP | Level/Nilai Maturitas SPIP | 25 % | 50% | 75% | 100 % / 3 |
| 3 | Meningkatnya Maturitas Manajemen Risiko | Level/Nilai Maturitas Manajemen Risiko | 25 % | 50% | 75% | 100 % / 3 |
| 4 | Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan | 25 % | 50% | 75% | 100% / 78 % |
| | | Opini BPK atas LKPD | 25 % | 50% | 75% | 100% / |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Prosentase Proges Rencana Pencapaian Target Kinerja | | | |
|-----|---|-----------------------------|---|-------|--------|------------------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| | | | | | | WTP |
| 5 | Meningkatnya Akuntabilitas pada Komponen Pengawasan | Nilai AKIP Perangkat Daerah | 25 % | 50% | 75% | 100 % / B |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | 25 % | 50% | 75% | 100% / 80 |
| | | Inovasi | 25 % | 50% | 75% | 100% / 1 inovasi |

C. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran Inspektorat untuk tahun anggaran 2024 triwulan II sampai dengan laporan ini dibuat, dapat dilihat pada table berikut :

| No. | SASARAN STRATEGIS | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|---|--------|-----------|---------|
| 1 | Meningkatnya Kapabilitas APIP | Level/Nilai Kapabilitas APIP | 3 | Proses | 50% |
| 2 | Meningkatnya Maturitas SPIP | Level/Nilai Maturitas SPIP | 3 | Proses | 50% |
| 3 | Meningkatnya Maturitas Manajemen Risiko | Level/Nilai Maturitas Manajemen Risiko | 3 | Proses | 50% |
| 4 | Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan | 78 % | Proses | 50% |
| | | Opini BPK atas LKPD | WTP | Proses | 50% |
| 5 | Meningkatnya Akuntabilitas pada Komponen Pengawasan | Nilai AKIP Perangkat Daerah | B | Proses | 50% |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | Proses | 50% |
| | | Inovasi | 1 | Proses | 50% |

Capaian Kinerja Keuangan Program Inspektorat triwulan II Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

| No | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|----|--|------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 10.218.634.992 | 3.029.767.918 | 29,65 |
| | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.795.788.524 | 2.150.457.206 | 31,64 |
| | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.795.788.524 | 2.150.457.206 | 31,64 |
| | 2. Administrasi Kepegawaian Daerah | 1.349.285.600 | 348.962.517 | 25,86 |
| | - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 1.147.727.000 201.558.600 | 334.046.767 14.915.750 | 29,10 7,40 |

| No | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|----|--|----------------------|--------------------|----------------|
| 2 | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 557.877.101 | 157.868.874 | 28,30 |
| | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor; | 6.478.450 | 2.044.000 | 31,55 |
| | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; | 9.936.611 | 5.696.520 | 57,33 |
| | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 45.920.000 | 9.232.000 | 20,10 |
| | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; | 35.783.040 | 8.702.000 | 24,32 |
| | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. | 447.159.000 | 129.044.354 | 28,86 |
| | - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12.600.000 | 3.150.000 | 25,00 |
| | 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 899.655.726 | 239.830.000 | 26,66 |
| | - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 899.655.726 | 239.830.000 | 26,66 |
| | 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 432.941.791 | 88.391.193 | 20,42 |
| | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat; | 129.586.791 | 47.360.917 | 36,55 |
| | - Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, dan Listrik; | 77.515.000 | 7.580.276 | 9,78 |
| | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. | 225.840.000 | 33.450.000 | 14,81 |
| | 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 183.086.250 | 44.258.128 | 24,17 |
| | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; | 142.530.000 | 33.108.128 | 23,22 |
| | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 40.556.250 | 11.150.000 | 27,49 |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 1.731.900.000 | 284.531.800 | 16,43 |
| | 3. Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 1.217.500.000 | 194.306.800 | 15,96 |
| | - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; | 409.180.000 | | |
| | - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah; | 302.950.000 | 72.548.400 | 17,73 |
| | - Reviu Laporan Kinerja; | 41.660.000 | 25.598.400 | 8,45 |
| | - Reviu Laporan Keuangan. | 72.956.000 | | |
| | - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 390.754.000 | 0 | 80,24 |
| | | | 0 | 0,00 |
| | | | 96.160.000 | 24,60 |
| 3 | 4. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu | 514.400.000 | 90.225.000 | 17,54 |
| | - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; | 21.940.000 | 0 | 0,00 |
| | - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 492.460.000 | 90.225.000 | 18,32 |
| | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | 708.746.664 | 46.696.087 | 6,58 |
| | 3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 54.194.000 | 0 | 0,00 |
| | - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 25.086.000 | 0 | 0,00 |
| | - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan | 29.108.000 | 0 | 0,00 |

| No | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|----|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| | 4. Pendampingan dan Asistensi | 654.552.664 | 46.696.087 | 7,13 |
| | - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah; | 142.650.000 | 17.700.000 | 12,40 |
| | - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi; | 173.130.000 | 1.070.000 | 0,62 |
| | - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; | 278.802.664 | 27.926.087 | 10,01 |
| | - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 61.380.000 | 0 | 0,00 |
| | Jumlah | 12.659.281.656 | 3.360.995.805 | 26,54 |

D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sampai dengan berakhirnya triwulan II Tahun Anggaran tahun 2024, capaian kinerja (outcome) masing-masing program tersebut secara umum masih menggunakan capaian pada akhir tahun anggaran 2023 karena penilaiannya dilakukan pada akhir tahun anggaran berjalan. Adapun capaian tersebut antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Outcome dari program ini adalah nilai AKIP perangkat daerah, hingga berakhirnya triwulan pertama nilainya adalah B, yang merupakan hasil evaluasi APIP atas AKIP Inspektorat pada pelaksanaan evaluasi Tahun Anggaran 2023. Sedangkan untuk capaian kinerja (outcome) berupa Indeks Kepuasan Masyarakat dan Inovasi masih belum dapat disajikan sehubungan belum dilakukan penilaian dan kemungkinan akan diketahui pada akhir atau setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2024.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Outcome dari program ini ada 3 antara lain Level/Nilai Kapabilitas APIP, Inspektorat hingga saat ini berada pada level 2 yang juga merupakan hasil evaluasi TA 2023; Level/Nilai Maturitas Manajemen Risiko, Inspektorat hingga saat ini berada pada level 2 yang juga merupakan hasil evaluasi TA 2023; Persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, capaian terakhir yang dirilis oleh BPK hingga triwulan I Tahun 2024 masih sejauh hasil dari pelaksanaan pemantauan tindak lanjut pada semester 1 TA 2023 yaitu pada persentase 74,58 walaupun tidak menutup kemungkinan persentase ini sudah meningkat sebagai hasil dari pemantauan tindak lanjut pada semester 2 tahun 2023.

3. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Outcome dari program ini adalah level/nilai maturitas SPIP, untuk outcome ini juga masih menggunakan capaian pada akhir tahun 2023 yang lalu yang mana Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar masih berada pada level 2.

4. Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat

Masing-masing program yang disebutkan sebelumnya terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian target kinerja untuk tahun 2024. Ada 10 (sepuluh) jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh inspektorat yang terdiri atas 28 (dua puluh delapan) jenis sub kegiatan. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan memiliki target dan capaian masing-masing yang selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat itu sendiri.

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar disebutkan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dokumen laporan kinerja triwulan II merupakan hasil evaluasi kinerja selama 3 bulan yaitu bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024. Sesuai hasil pengukuran, evaluasi dan analisa kinerja terhadap 3 (tiga) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan, dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan.

Pematangsiantar, Juli 2024
INSPEKTUR,



HERRI OKSTARIZAL, S.H, M.H, CGCAE
PEMBINA Tk. I
NIP.19810927 200502 1 001